

# EFEKTIVITAS PERAN BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

Oktalia Azmi Fadila<sup>1</sup> Mahrizal<sup>2</sup> Siti Khalijah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Teuku Umar  
[Oktalia82@gmail.com](mailto:Oktalia82@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar  
[Mahrizal@utu.ac.id](mailto:Mahrizal@utu.ac.id)

<sup>3</sup>Bappeda Kota Medan  
[Khalijahsiti710@gmail.com](mailto:Khalijahsiti710@gmail.com)  
Correspondent author: [Mahrizal@utu.ac.id](mailto:Mahrizal@utu.ac.id)

## Abstract

Bappeda is an important regional institution that has a function in the development of an area, where the successful assessment of the development of an area is assessed from Bappeda that performs its functions and duties well. During the Covid-19, Bappeda's role is very important in the development of Medan city, where Bappeda must carry out development in line with the Covid-19 protesters that hit the world. The presence of Covid-19 in Indonesia is very affecting in terms of economy and development, because of the rapid development of the virus that many people are exposed to. This caused many investors to change their investment plans in Indonesia and then impact the slump in the Indonesian economy. The impact of Indonesia's economic downturn is the delay in development that has been planned by Bappeda. In addition, Bappeda must also allocate funds while the pandemic is still running. All aspects of the point of view must be considered in the regional development plan that will be contained in the RPJMD and will be implemented by opd as soon as the opd performance will be evaluated by Bappeda then Bappeda will be accountable to the Mayor of Medan. In the implementation of development planning and in the implementation of it of course there are some obstacles that hinder regional development, therefore Bappeda must have prepared a solution of the planning.

**Keywords:** *Bappeda, Development Planning, Effectiveness.*

## 1. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui Negara Indonesia sedang mengalami proses pembangunan yang sangat pesat disegala bidang. Untuk mencapai Indonesia yang maju, pembangunan ini bukan saja tentang pembangunan yang berbentuk fisik seperti terbangunnya jalan raya dan transportasi umum untuk seluruh masyarakat. tetapi pemerintah juga mengupayakan pembangunan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan kualitas SDM bertujuan agar mempermudah jalannya pembangunan di Indonesia. Di mana dengan adanya SDM yang berkualitas maka pemerintah lebih mudah untuk mengarahkan, membentuk dan membangun pembangunan disetiap daerah. Untuk membangun sebuah pembangunan maka harus ada pembenahan pemerintah sedemikian rupa, karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana (Iskandarsyah, 2018)

Kota Medan adalah wilayah yang hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah kabupaten deli serdang yaitu sebelah barat, timur dan selatan, serta sepanjang wilayah utara kota Medan berbatasan langsung dengan selat malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut hal ini menyebabkan Medan termasuk kota strategis untuk berdagang.

Hal diatas dilihat dari letak wilayah secara administratif, sedangkan secara geografis kota medan terletak pada koordinat 2° 27' – 2° 47' Lintang Utara dan 98°

35° - 98° 44' Bujur Timur (Pemerintah kota Medan, 2021). Sehingga kota Medan terletak dibagian pantai timur Sumatra utara dan pada bagian utara adalah daerah pesisir, dan kota Medan juga memiliki kelurahan sebanyak 151 dan kepling (kepala lingkungan) sebanyak 2001 sedangkan camat sebanyak 21 (PLT OKDA). Dengan banyaknya pengurus kelurahan diharapkan akan mempermudah pelaksanaan pembangunan kota medan.

Hadirnya bappeda adalah sebagai pemerintah yang berhak dan berwenang untuk merencanakan pembangunan di suatu daerah, pengendalian pembangunan daerah, pelaksanaan kerjasama pembangunan antara daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta dalam dan luar negeri. Pembangunan yang dilakukan oleh bappeda juga harus sejalan dengan visi dan misi walikota dari daerah tersebut (Akbar F, 2016)

Sejak diberlakukannya UUD No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka terjadi perubahan dalam pembangunan ekonomi yang pada awalnya sentralis berubah menjadi desentralis. Artinya memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk membangun wilayah termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka setiap daerah harus mengembangkan potensi lokal yang ada pada setiap daerah agar dapat menuju kemandirian di daerah tersebut (Desril Tafria 2010). Hal ini agar suatu daerah dapat menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dengan daerah lainnya. Dalam pembangunan nasional berarti mencakup semua aspek kehidupan baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, ideologi ataupun stabilitas Negara. Umumnya pembangunan yang dilakukan oleh Negara didasarkan oleh tiga pendekatan antara lain pendekatan mikro, sektoral dan regional.

Menurut Ginanjar Katrtasasmitha (2006), pembangunan makro mencakup sasaran dan upaya pada lingkup nasional, yang mana pencapaiannya merupakan hasil dari upaya pencapaian tingkat sektoral dan regional. Dari pendapat tersebut dapat kita Tarik kesimpulan bahwa pembangunan sektoral berfokus kepada bidang pertanian, ekonomi dan lain-lain. Sedangkan pada pembangunan regional berfokuskan kepada pelaksanaan pembangunan di suatu daerah tertentu yang pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan itu sendiri.

Pada kasus Bappeda kota Medan khususnya musrenbang yang diadakan rutin selalu mempunyai kekurangan dari hasil musrenbang yang sama dari tahun 2015 hingga tahun 2021 diantaranya (1) factor anggaran, (2) sumberdaya masyarakat. (3) sumberdaya perangkat daerah yang belum memadai, (4) pergeseran usulan kegiatan (konsistensi pemimpin). (Putri, A. 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bappeda kota Medan dalam pembangunan kota, (2) bagaimana efektivitas pembangunan infastruktur kota Medan dan kendaraan umum dalam kota, (3) tantangan yang akan dihadapi Bappeda kota Medan di Covid-19.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Bappeda**

Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) adalah: lembaga teknis daerah dibidang peneliitandan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui seketaris daerah. (Lantaeda, S. 2017) Bappeda dibentuk berdasarkan pertimbangan:

1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

2. Dan dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu.

Dalam rangka membantu proses pembangunan secara terpadu dan efisien seperti yang tertulis pada UU No 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional. Yang pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai asas dan tujuan:

1. Pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap kepada perubahan.
3. System perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Negara.
4. System perencanaan pembangunan daerah bertujuan sebagai berikut:
  - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
  - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah
  - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
  - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Halim, A. 2014).

Bappeda kota Medan menyerahkan rencana pembangunan kepada OPD dimana nantinya setelah musrenbang diadakan OPD akan melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan dan dibahas didalam musrenbang. Hal ini dikarenakan Bappeda kota medan hanya menjadi pengawas dan perencanaan dalam pembangunan kota.

### **Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan adalah cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera dan makmur. (KENO, D. C. 2017) Menurut Arthur W. Lewis perencanaan pembangunan adalah kumpulan kebijaksanaan dan program yang bertujuan untuk merangsang masyarakat dan swasta agar menggunakan sumberdaya secara optimal.

Selain itu dalam perencanaan pembangunan daerah haruslah memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks dimana pembangunan harus saling bergantung baik dalam SDM (Sumber Daya Manusia), SDA (Sumber Daya Alam), SDF (Sumber Daya Fisik), DLL. (Rusmulyani, K. 2020) Maka dari itu pada saat pembangunan daerah dilaksanakan maka secara tidak langsung pemerintah juga harus memperhatikan pembangunan kualitas SDM yang ada didalam daerah tersebut. Hal ini bertujuan agar pembangunan suatu daerah dapat berjalan secara optimal baik dari sudut pandang ekonomi, transportasi maupun SDM.

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari jangka waktu perencanaan pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu:

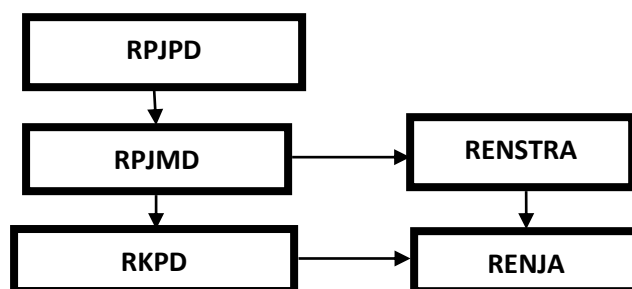
1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)  
Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun RPJPD yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang. Tetapi dalam penyusunan RPJPD harus mengacu kepada RPJPN (rancangan pembangunan jangka panjang nasional) sehingga keduanya sejalan.

2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)  
Perencanaan jangka menengah mencakup waktu 5 tahun. Perencanaannya disusun oleh pemerintah daerah. Selain itu RPJMD juga merupakan turunan dari RPJPD dan RPJPN sehingga lebih bersifat operasional. Pada RPJMD juga terdapat sasaran dan target pembangunan kuantitatif dan kualitatif agar perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah jika dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi.

Dalam penyusunan RPJPD harus saling berkaitan dengan RPJPN agar pembangunan yang dilakukan di daerah juga berpengaruh kepada pembangunan nasional. Lalu dalam penyusunan RPJMD harus berkaitan juga dengan RPJPD dan RPJPN. Selain RPJMD dan RPJPD dalam perencanaan pembangunan juga dikenal istilah-istilah sebagai berikut:

1. RKPDP (Rancangan Kerja Pemerintah Daerah).  
RKPDP merupakan hasil usulan dari masyarakat yang disampaikan oleh OPD (Organisasi Perangkat daerah), untuk membentuk RKPDP maka akan diadakan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah). RKPDP akan disusun pertahunnya tetapi masih sejalan atau masih berkaitan dari RPJMD dan RPJPD, selain itu RKPDP dibentuk untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Dalam MUSRENBANG akan ditampilkan hasil kinerja OPD terkait selama waktu yang ditentukan, dan akan dibahas kendala lapangan apa saja yang menghambat kinerja OPD dan pengoptimalan anggaran.
2. RENSTRA (Rencana Strategis)  
RENSTRA adalah komponen penting di sebuah organisasi. RENSTRA akan di rancang terlebih dahulu oleh masing-masing OPD dengan mempertimbangkan SDM atau SDA yang dimiliki. RENSTRA disusun untuk jangka waktu menengah yaitu 1-5 tahun, dimana nantinya di dalam RENSTRA akan di gambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan RENSTRA antara lain sebagai berikut:
  - Sebagai alat pengukur yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja
  - Mempermudah penyusunan dan penyampaian laporan kinerja
  - Dengan adanya RENSTRA akan lebih mudah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada
3. RENJA (Rencana Kerja)  
RENJA adalah dokumen yang akan diperbarui setiap 1 tahun sekali di dalam RENJA terdapat program dan kegiatan disertai dengan pendanaan agar dapat mencapai perencanaan pembangunan, ini adalah sebuah kerangka anggaran yang telah ditentukan RENJA akan mengacu pada RENSTRA, RKPDP, RPJMD, RPJPD (RENJA Bappeda tahun 2016 Pemerintah kabupaten Gunungkidul)

Berikut adalah bagan yang menunjukkan bagaimana perencanaan pembangunan daerah terbentuk:



Gambar.1 Perencanaan Pembangunan

Pada Bappeda kota Medan pembangunan SDM dilakukan dengan memberi pemahaman kepada anak muda kota Medan tentang bagaimana pembangunan kota yang akan dilakukan. Pemberian pemahaman ini dilakukan ketika Bappeda kota Medan diundang dalam beberapa seminar milenial. Pernyataan ini berdasarkan banyaknya surat undangan menjadi pembicara masuk di buku catatan surat Bappeda kota Medan.

**Efektivitas**

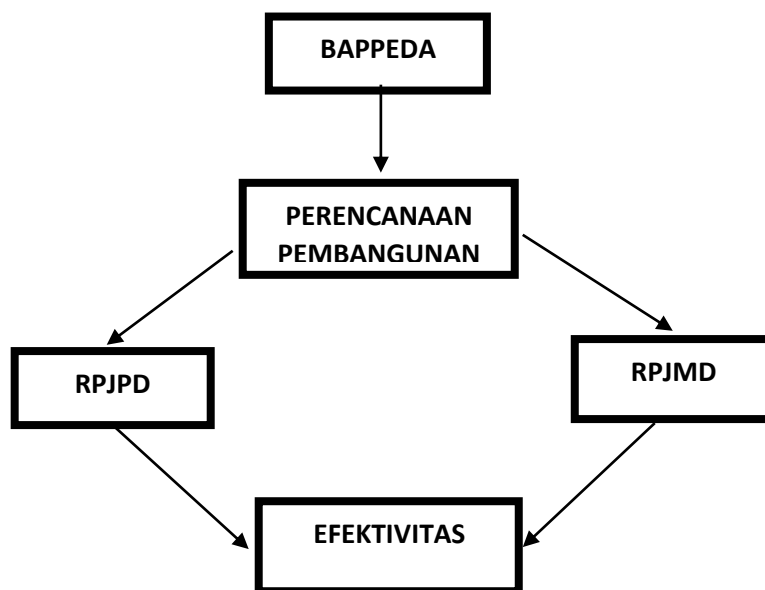
Umumnya efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan dengan kata lain semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Selain itu efektivitas dapat diartikan dengan seberapa baik suatu pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya ketika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan yang telah direncanakan baik dari segi biaya, waktu, mutu hal tersebut dapat dikatakan efektif.

Ada beberapa indikator penilaian efektivitas diantaranya: (1) Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan atau perundang-undangan, dan sebagainya. (2) Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik. (3) Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka panjang (efek langsung). (Sudiarsa, K. 2013)

Dalam penelitian ini peneliti menilai indikator efektivitas Bappeda kota Medan menggunakan indikator keluaran dan indikator hasil. Peneliti akan menilai pembangunan yang direncanakan pada RPJMD tahun 2019-2020 apakah sudah terlaksanakan atau tidak terlaksanakan sama sekali.

**KERANGKA PIKIRAN**

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini mempunyai kerangka pikiran sebagai berikut:



**Gambar.2 Kerangka Pikiran**

Dimana Bappeda melakukan perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka tertentu perencanaan pembangunan jangka panjang tersebut akan tertuang kedalam RPJPD lalu setelah itu untuk mewujudkan perencanaan tersebut maka perencanaan

akan dipecah kedalam perencanaan pembangunan jangka menengah RPJMD sehingga perencanaan jangka panjang dapat dilaksanakan secara bertahap. Maka keduanya mempunyai hubungan kesinambungan dalam perencanaan Daerah. Setelah pelaksanaan perencanaan Daerah maka akan dinilai efektivitas dalam pelaksanaan tersebut seperti apasaja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

### **3. METEDOLOGI PENELITIAN**

#### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan Sumatra utara dimana ruang lingkup penelitian ini ialah efektivitas peran bappeda dalam perencanaan pembangunan (RPJMD dan RPJPD) Kota Medan.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, dimana peneliti mendapatkan data langsung dari Kantor bappeda dengan menggunakan metode quisioner dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi di Kantor bappeda Kota Medan, yang menjadi sampel dari penelitian ini 10% dari 100% karyawn Bappeda kota Medan.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, peneliti memakai beberapa metode, yaitu :

1. Observasi, yakni mengumpulkan data/informasi dengan mempelajari fenomena atau fakta-fakta yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, dan proses kerja di lapangan secara langsung. (Sugiyono, 2016: 142). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi berjenis partisipan. Penulis langsung didalam kegiatan yang diobservasi.
2. Kuesioner, yakni memberikan sejumlah pertanyaan/ Pernyataan tertulis kepada responden untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. (Sugiyono, 2016: 142).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Profil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan**

Bappeda kota medan berlokasi di kantor walikota medan, sesuai dengan peraturan kota medan nomor 5 tahun 2001 dan dalam keputusan walikota medan Bappeda bertugas untuk membantu walikota dalam pembangunan kota medan serta penilaiannya. (Lili Hera Wati 2020).

Bappeda Kota Medan memiliki fungsi untuk merumuskan suatu kebijakan dalam perencanaan pembangunan Kota, selain itu bappeda juga menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPMD, RKPd, RENSTRA, RENJA. Selain dari pada menyusun rencana pembangunan, Bappeda Kota Medan juga harus menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam penyusunan pembangunan dan anggaran untuk membangun Kota Medan berkah sesuai dengan visi Kota Medan “terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif “Bappeda harus mengikuti perkembangan dan harus mempersiapkan rencana pembangunan Kota agar dapat menyempurnakan perencanaan pembangunan Kota lebih lanjut.

Dari visi Walikota dapat disimpulkan beberapa aspek terbentuknya RPJMD yaitu Medan berkah, Medan maju, dan Medan kondusif. Dalam pelaksanaan ini OPD yang bersangkutan harus menyesuaikan RENJA masing-masing aagar sejalan dengan visi Walikota Medan dan agar terlaksanakannya visi dari Walikota Medan. Bappeda adalah pusat kontrol para OPD dimana arahan dan saran dari Bappeda sangat diperlukan oleh OPD dalam penyusunan RENJA (Musrenbang RPPJMD Kota Medan 2021-2026)

### **Visi dan Misi Bappeda Kota Medan**

Visi adalah gambaran jauh kedepan atau visi juga bisa diartikan sebagai impian dan tujuan yang jauh kedepan adapun visi Bappeda Kota Medan:

“Terwujudnya Bappeda yang Profesional dan Partisipasif Mendukung Akselerasi Pembangunan Kota”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Bappeda Kota Medan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas ketersediaan rencana pembangunan merupakan langkah strategis yang dilaksanakan agar rencana pembangunan kota tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan formal, tetapi dilandasi kebutuhan material. Sekaligus alternative kebijakan dan formulasi program serta kegiatan dan penganggaran pelayanan umum yang ditetapkan
2. Meningkatkan efektivitas pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja pembangunan kota, yang merupakan siklus manajemen pembangunan kota yang diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi bahwa implementasi pelaksanaan rencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sekaligus memberikan umpan balik bagi siklus perencanaan berikutnya.
3. Meningkatkan itegrasi dan koordinasi rencana pembangunan merupakan upaya meningkatkan nilai optimum dari setiap pemanfaatan sumberdaya pembangunan yang digunakan baik secara makro maupun mikro. penginterasian dan pengkoordinasian sendiri diarahkan untuk memaduserasikan tujuan nasional dan regional dalam pembangunan secara hirarkis, sehingga dapat di formulasikan berbagai rencana efektif dan yang bersifat implementasi.

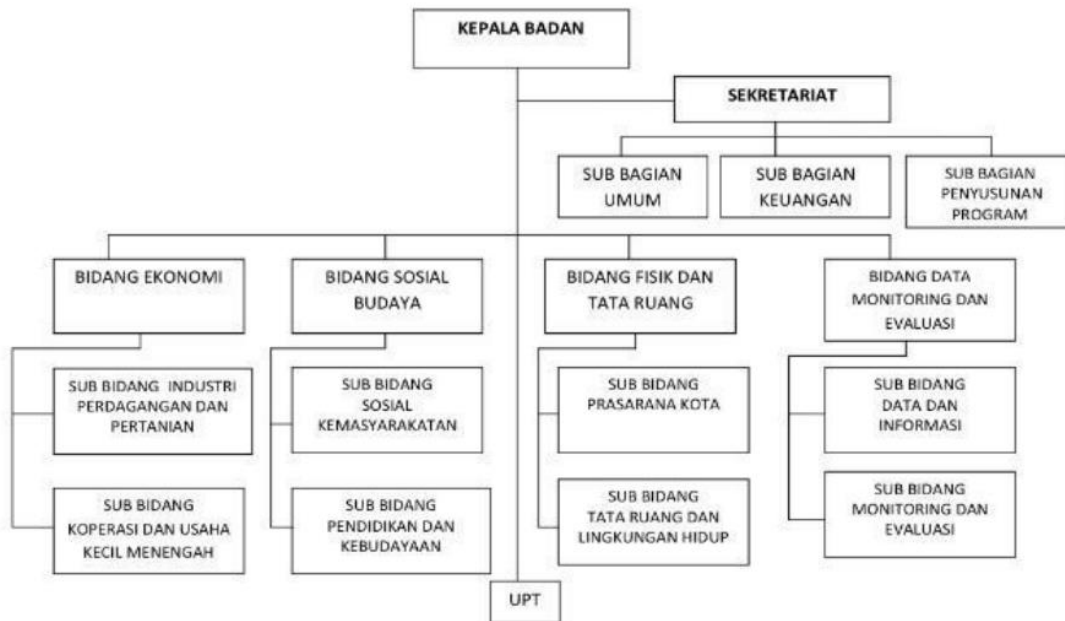
### **Struktur Organisasi Bappeda**

Dalam peraturan daerah kota medan nomor 3 tahun 2009 tanggal 4 maret 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota medan secara umum (Cindy Silvia, 2020). RENSTRA Bappeda kota medan pelaksanaannya akan dikelola oleh seluruh bagian dari Bappeda kota medan dengan struktur sebagai berikut:

1. Kepala Bappedda
2. Seketaris, membawahi:
  - a. Sub. Bagian Umum
  - b. Sub. Bgian Keuangan
  - c. Sub. Bagian Penyusunan Program
3. Bidang ekonomi, membawahi:
  - a. Sub. Bidang industri perdagangan dan pertanian
  - b. Sub. Bidang koperasi dan usaha kecil menengah
  - c. Sub. Bidang investasi dan pariwisata
4. Bidang social budaya, membawahi:
  - a. Sub. Bidang social kemasyarakatan
  - b. Sub. Bidang pendidikan dan kebudayaan
  - c. Sub. Bidang pemerintah umum dan otonomi daerah
5. Bidang fisik dan tat ruang, membawahi:
  - a. Sub. Bidang prasarana kota
  - b. Sub. Bidang tata ruang dan lingkungan hidup
  - c. Sub. Bidang perumahan dan kawasan pemukiman
6. Bidang data monitoring dan evaluasi, membawahi:
  - a. Sub. Bidang data dan informasi
  - b. Sub. Bidang monitoring dan evaluasi
  - c. Sub. Bidang analisis dan pelaporan

Pada saat musrenbang berjalan maka pada hari kedua dan ketiga musrenbang diadakan diskusi kelompok dengan para OPD yang bersangkutan oleh para bidang untuk diskusi kelanjutan dan hambatan dalam pembangunan Kota Medan (Musrenbang RPPJMD Kota Medan 2021-2026).

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA MEDAN



**Gambar.3 struktur Bappeda**

*(Sumber: dokumen Bappeda Kota Medan, 2020)*

### Faktor Penghambat Efektivitas Bappeda Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dalam menjalankan tugasnya Bappeda kota Medan terdapat beberapa penghambat beberapa diantaranya adalah politik. Politik dapat menghambat kinerja bappeda dimana banyak pihak-pihak yang menggunakan kekuatan politis dalam mempengaruhi keputusan pembangunan, seperti contohnya prioritas pembangunan jalan yang mana banyak dipengaruhi orang-orang yang meminta bagian anggaran atau korupsi dana pembangunan jalan yang seharusnya dalam rencana akan dibangun jalan beton malah berubah menjadi jalan aspal biasa yang tidak bertahan lama.

Selain dari sisi politik, SDM juga berpengaruh dalam efektivitas bappeda. Dimana ketika SDM yang bekerja di Bappeda sesuai dengan potensinya masing-masing akan mempermudah jalannya proses perencanaan pembangunan kota medan, seperti yang diamati pengamat sering sekali SDM yang ada di Bappeda tidak sesuai dengan pendidikan yang ditempuh, SDM yang ada terlampau oleh pengalaman berkerja, maka ketika SDM diposisikan tidak sesuai dengan pendidikan yang ditempuh butuh waktu yang lumayan lama agar SDM tersebut berpengalaman dan paham dalam bidang tersebut. Hal ini lumayan cukup memakan waktu dalam penyesuaian diri, sedangkan bappeda adalah peran penting untuk pembangunan Daerah dan Bappeda juga harus selalu mengawasi jalannya pembangunan.

Selanjutnya dalam perubahan peraturan dan komitmen pemimpin dapat berpengaruh kepada efektivitas Bappeda Kota Medan dalam melaksanakan tugas. Seperti yang diketahui RPJPD sejalan dengan RPJPN maka dari itu ketika kementerian dalam negeri sering berubah-ubah dalam format perencanaan akan berpengaruh juga kepada jalannya efektivitas Bappeda kota medan.



Selain daripada itu evaluasi pelaksanaan pembangunannya masih belum terlaksana, dalam hal ini Bappeda Kota Medan masih dalam tahap evaluasi kinerja OPD, sehingga masih banyak pelaksanaan pembangunan yang tidak mempunyai spesifikasi dana kualitas yang baik, sebagai contoh lapangan: banyak jalan yang dibangun dengan kualitas yang kurang baik sehingga ini berdampak kedepannya jalan yang baru saja dibangun akan rusak lagi dalam kurun waktu yang cepat.

Dalam Musrenbang yang di adakan pada 16-18 juni 2021 di hotel Santika Bank Indonesia menyampaikan tantantangan dan peluang, pertumbuhan dan inflasi Kota Medan. Dimana pada masa pandemic Kota Medan mengalami penurunan pada pertumbuhan ekonomi hal ini mengakibatkan bertambahnya pengangguran di Kota Medan dan angka kemiskinan yang mulai beraanjak naik kembali, pada masa covid-19 Kota Medan mempunyai tantangan baru dalam pelaksanaan pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

- Perkembangan covid-19  
Dimana perekonomian Kota Medan harus tumbuh dan maju beringan dengan adanya covid-19, yang berarti harus adanya jarak antar orang saat berinteraksi dan mall juga cafe yang akan tutup di jam 10.00 malam.
- Pemilihan kota wisata  
Dalam pemilihan Kota wisata adalah agar dapat membantu pertumbuhan ekonomi Kota Medan, dikarenakan pada saat pandemic seperti idiperhatikan aspek pariwisata adalah aspek incaran investor luar dan dalam negeri.
- Pengolaan tata pemerintah  
Karna pembangunan kota juga akan berpengaruh kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi maka dari itu tata pemerintah berperan penting untuk keduanya, dimana nantinya SDM Kota Medan yang sudah mulai terbiasa dengan pembaruan akan otomatis ikut serta membantu dalam pertumbuhan ekonomi, remaja di Medan sudah berbondong-bondong untuk melestarikan budaya yang tertinggal dan mendukung penuh UMKM yang ada di Medan dengan membangun beberapa angkringan di kota tua yang merupakan sebagian dari wisata kota.
- Teknologi  
Teknologi yang akan terus berkembang harus dioptimalkan di kota medan sendiri, dimana nantinya para remaja kota akan mempromosikan transportasi kota seperti Bis, MRT yang masih dalam pembangunan, DLL. Hal ini dilakukan agar mengurangi polusi udara dan dapat membantu pertumbuhan perekonomian daerah.

Agar tercapainya pertumbuhan ekonomi maka Bank Indonesia memaparkan beberapa cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan antara lain:

- Penanganan kesehatan harus berjalan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dimasan covid-19.
- Peningkatan kredit
- Dan peningkata UMKM

Selain itu pada paparan bank Indonesia tentang inflasi bahwa Kota Medan mengalami inflasi di bulan April dan May yang dipengaruhi oleh naiknya harga bahan pangan.

Dalam pembangunan daerah salah satu yang menjadi penghambat adalah partisipasi masyarakat maka dari itu Bappeda Kota Medan berupaya agar masyarakat mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Kota Medan. Pada dasarnya basis pembangunan Kota Medan di Kelurahan dan Kecamatan, ketika Kelurahan dan Kecamatan sudah bisa Mengontrol masyarakatnya masing masih maka akan otomatis berdampak dan berpengaruh kepada pembangunan daerah Kota Medan.

Selain itu angka kriminalitas juga semakin tinggi dimana masyarakat selalu merasa tidak aman dimanapun (Musrenbang 2021-2026 bagian sosbud) hal ini terjadi dikarenakan banyaknya pengangguran dan terjadinya kenaikan harga pangan menyebabkan beberapa orang melakukan kriminalitas untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pengangguran nantinya akan berpengaruh kepada ketimpangan Kota Medan, semakin banyak pengangguran maka angka kemiskinan bertambah hal ini juga otomatis akan mempengaruhi angka ketimpangan.

Sesuai dengan RPJMN adalah terbentuknya aspek perwujudan permukiman layak huni, lingkungan hijau, dan teknologi. Maka dalam pengurusan rumah rumah pinggir pemerintah harusnya sudah menyediakan fasilitas baru untuk menggantikan rumah yang telah digusur, karna jika hanya menggusur pemukiman oinggiran yang kumuh tanpa menggantinya dengan fasilitas baru yang menjamin akan menabah jumlah pengamen dan pengemis di lampu merah kota dan dibawah jembatan fly over. Selain itu air minum dan air bersih harus menjadi prioritas untuk dapat dialirkan ke seluruh lapisan masyarakat Kota Medan.

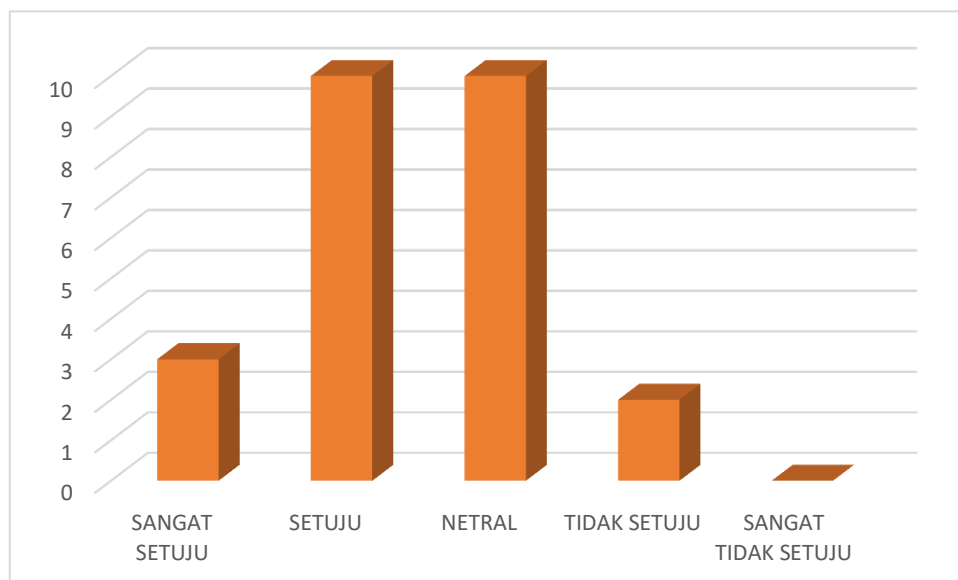
Selain dari pada yang diatas kebakaran juga dapat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. "Setiap bencana yang terjadi akan timbul proses kemiskinan" (Damkar Musrenbang, 2021-2026) dikarenakan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran dan 90% kebakaran terjadi disebabkan oleh human eror.

Dalam musrenbang bagian ekonomi, juga dijelaskan untuk mewujudkan visi Walikota Medan inovatif dan Medan berintegritas maka akan diadakannya system pusat pasar dan mewujudkan Kota Medan sebagai kota perdagangan berbasis internasional. Melalui program stabilitas harga dan penggunaan pemasaran produk dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi dalam perdagangan adalah kurangnya daya saing produk terutama kualitas packagikng produk yang menarik agar konsumen tertarik. Kurangnya akses pasar dan teknologi juga modal bagi UMKM.

Dalam pertanian juga mempunyai hambatan yaitu hambatan lahan yang semakin berkurang disebabkan sering terjadinya ahli fungsi lahan, dan SDM belum mampu untuk melakukan teknologi budidaya, tetapi masyarakat sudah mulai mampu memilah makanan sehat dan baik seperti mengutamakan makanan yang berbasis karbohidrat, DLL.

Berikut adalah hasil kuisisioner yang dibagikan kepada sebagian karyawan Bappeda Kota Medan sebagai sempel penelitian:

**Grafik.1 Hasil Kuisisioner**



Sumber: Kuisisioner 2021

Dari hasil kuiseoner diatas dapat disimpulkan bahwa politik bisa saja mempengaruhi efektivitas Bappeda dilihat dari banyaknya sampel yang memilih netral, lalu SDM juga sangat mempengaruhi efektivitas Bappeda karena banyaknya sampel yang memilih sangat setuju, selanjutnya perubahan peraturan dapat memperlemah efektivitas Bappeda , evaluasi kinerja cukup rutin dilakukan Bappeda, selanjutnya komitmen pemimpin berpengaruh terhadap efektivitas Bappeda dilihat dari hamper seluruh sampel memilih setuju.

Pembangunan fasilitas umum di Kota Medan sudah lumayan cukup memadai masyarakatnya untuk melakukan aktivitas sehari hari ini dilihat dari banyaknya sampel yang memilih netral, koordinasi antar OPD dalam pembangunan Kota Medan penting untuk dilakukan, RPJMD tahun 2020 terlaksana dengan baik, analisis ekonomi dalam perencanaan pembangunan harus dilakukan secara komprehensif dilihat dari banyaknya sampel yang memilih setuju, perubahan prosedur dan format perencanaan pembangunan sering terjadi ketika sudah mendekati deadline penandatanganan RKPD, dan RPJMD.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari uraian penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Bappeda Kota Medan sebagai kordinator pembangunan. Bappeda sudah mulai melaksanakan tugas untuk mewujudkan visi misi Walikoota. Dengan menggerakkan OPD untuk mengoptimalkan kinerja dan selalu mengevaluasi kinerja OPD, selain itu Bappeda Medan juga berusaha meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi pembangunan kedaerah-daerah terpencil.

Selain itu Bappeda juga sudah mulai menerapkan sistem 'masyarakat akan dijadikan subjek dalam pembangunan kota medan bukan hanya objek' hal ini langsung disampaikan pada acara Musrenbang RPJMD 2021-2026.

Bappeda kota Medan efektif dalam menjalankan tugas untuk pembangunan kota Medan dilihat dari hasil wawancara dan kuisisioner yang banyak memilih lebih nyaman menggunakan kendaraan umum, dan beberapa akses jalan dari desa kekota yang sudah mulai di bangun menggunakan aspal

### **Saran**

Keterangan keuangan daerah dan segala info yang seharusnya tertera dan terbuka untuk umum sebaiknya bidang social budaya mengupload diweb Bappeda agar masyarakat dapat meliahat tentang informasi tersebut. Karena pada web Bappeda tidak terdapat info jelas tentang Bappeda baik visi, misi ataupun struktur organisasi, sehingga masyarakat umum sering tidak mengenal apa itu Bappeda dan apa fungsi Bappeda.

Dalam pembangunan perekonomian kota medan, sebaiknya bidang ekonomi dan social budaya melibatkan milenial, milenial menjadi ujung tombak yang tajam karena mereka menguasai internet dan dapat memotivasi sesama milenial untuk lebih mencintai produk dalam negeri. selain itu dalam pembangunan ekonomi di kota medan akan sejalan dengan pembangunan infastruktur dimana kawasan pusat kota Medan dan kota tua sebaiknya dijadikan kawasan milenial dan kawasan pusat oleh-oleh sehingga ketika wisatawan berkunjung mereka bisa berwisata bangunan tua khas Belanda dan mengeksplor jajan khas kota medan di kota tua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Riyadi, H. R. Efektivitas Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Kota Padang di Era Otonomi Daerah. *Jurnal WACANA*, 13(1), 40023.
- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27.
- Nasution, M. A. (2020). Efektivitas Electronic Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115-122.
- MINARNI, S., Razak, A., & Fuhaidah, U. (2019). "TINJAUAN YURIDIS TUGAS POKOK BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH" (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- UNGGUL, B. B. P. T., & TERNAK, D. H. P. RENSTRA.
- Kholifatul Khasanah, L. (2021). *ANALISIS ANGGARAN BELANJA UNTUK MENILAI EKONOMIS, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MADIUN* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Pemerintah Kota Medan. (2020). *Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2021*. Medan: Pemerintah Kota Medan.
- Suhendra, A., & Ginting, A. H. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun Smart City di Kota Medan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2(3), 185-195.
- Simarmata, C. S. C. (2020). Laporan Kuliah Kerja Lapangan Kinerja Sekretariat pada Sub Bagian Umum di BAPPEDA Kota Medan.
- Sudiarsa, K. (2013). Analisis Realisasi Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buleleng melalui Pengukuran Value for Money. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 1(1).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-24 Bandung : Alfabeta.
- Putri, A. O., Sirojuzilam, S., & Kadir, A. (2018). Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1), 58-71
- Halim, A. (2014). Analisis Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, 2(2).
- Lantaeda, S. B., LENGKONG, F. D., & RURU, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- KENO, D. C., LENGKONG, F. D., & POMBENGI, J. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Ibu Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Rusmulyani, K. (2020). *Semangat Nasionalisme dalam Bingkai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Nizamia Learning Center.